

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI MELALUI BELANJA DAERAH SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING DI PROVINSI SULAWESI UTARA (2010-2019)**

Oleh : Daniel R. Kaluara¹, Een N. Walewangko², Steeva Y. L. Tumangkeng³.

^{1,2,3} Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email : danielkaluara2@gmail.com

Abstrak

Salah satu yang menjadi tolak ukur untuk melihat keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah mengukur seberapa besar pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan mengetahui pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan ditemukan komponen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah satunya pajak dan retribusi daerah yang memiliki peran dalam sumber pendapatan daerah yang dikelola pemerintah yang langsung berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah sebagai variabel intervening. Populasi dalam penelitian ini adalah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang di ambil selama kurun waktu 10 tahun, mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2019. Data-data tersebut diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Hasil regresi pertama menunjukkan bahwa Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, sedangkan Penerimaan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil regresi kedua menunjukkan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil regresi ketiga menunjukkan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Kata Kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi

Abstract

One of the benchmarks to see the success of the region in implementing regional autonomy is to measure how much economic growth a region has. By knowing the effect of regional taxes and levies on economic growth, it is hoped that components that can affect economic growth will be found, one of which is regional taxes and levies that have a role in local revenue sources managed by the government which directly impact on economic growth as measured by Gross Regional Domestic Product. (GDP) at constant prices This study was conducted to determine the effect of Regional Tax Revenue and Regional Retribution on Economic Growth through Regional Expenditures as an intervening variable. The population in this study is North Sulawesi Province. The study uses data on the realization of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) which was taken over a period of 10 years, starting from 2010 to 2019. These data were obtained from the Regional Revenue Service (Dispenda). The results of the first regression indicate that Regional Tax Revenue has a significant effect on Regional Expenditures, while Regional Retribution Revenues have no effect on Regional Expenditures. The results of the second regression show that Regional Tax Revenue and Regional Levies have no effect on Economic Growth. The results of the third regression show that Regional Expenditures have a significant effect on Economic Growth.

Keywords : Local Taxes, Local Retribution, Regional Expenditure and Economic Growth

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional ialah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan suatu proses pembangunan keseluruhan suatu sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Untuk mempercepat tujuan pembangunan nasional, pemerintah memberikan otonomi daerah yang luas kepada setiap daerah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Dalam rangka menerapkan sistem otonomi daerah, setiap daerah membutuhkan investasi dalam jumlah yang besar yang pelaksanaannya harus berdasar pada kemampuan daerah itu sendiri.

Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang nyata maksudnya pemberian otonomi kepada daerah. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah yaitu otonomi seluas-luasnya, maka dengan demikian salah satu kewenangan dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan pemungutan pajak guna meningkatkan pendapatan daerah dimaksudkan untuk pembangunan daerah yang selanjutnya berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Pajak daerah merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya berada pada pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota. Kewenangan daerah dalam memungut pajak ini telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Undang-undang tersebut menggantikan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi daerah dan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi daerah. Dengan peningkatan pendapatan pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pembangunan daerahnya untuk mewujudkan proses kegiatan ekonomi daerah tersebut, seiring pendapatan yang semakin meningkat dan pembangunan daerahnyapun berjalan maka pertumbuhan ekonomi daerah tersebut berjalan dan akan terus meningkat.

Salah satu yang menjadi tolak ukur untuk melihat keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Dengan mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan ditemukan komponen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi salah satunya pajak daerah yang memiliki peran dalam sumber pendapatan daerah yang dikelola pemerintah yang langsung berimbas pada pertumbuhan ekonomi yang di ukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan, hal ini bertujuan agar terciptanya suatu kesejahteraan atau keseimbangan antara pemerintah daerah dengan masyarakat daerahnya sendiri.

Penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan uraian ataupun latar belakang di atas, penulis akhirnya melakukan penelitian dengan judul "*Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening di Provinsi Sulawesi Utara (2010-2019)*"

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Otonomi Daerah

Menurut Said (2008:5), otonomi daerah adalah proses devolusi dalam sektor publik dimana terjadi pengalihan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota atau proses

pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kejadian ekonomi yang bersifat jangka panjang dan merupakan sumber utama dalam peningkatan standar hidup ekonomi masyarakat. Istilah pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan terjadinya kemajuan atau perkembangan ekonomi dalam suatu negara ataupun suatu daerah.

2.1.3 Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah menurut pasal 1 angka 10 undang - undang No.28 Tahun 2009 Tentang pajak daerah dan retribusi daerah menjelaskan: “Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat”

2.1.4 Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh. Retribusi hanya dapat dikenakan apabila pemerintah daerah memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau pemerintah daerah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan tertentu.

2.1.5 Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Dalam hal ini data yang dipakai adalah sekunder, yaitu data yang di peroleh dari sumber kedua. Data sekunder ini menggunakan data runtut waktu (time series) dengan runtut waktu selama 10 tahun yaitu data tahun 2010 sampai tahun 2019.

Definisi Operasional

Definisi variabel yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009), dihitung dalam satuan rupiah/tahun.
2. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan (Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009), dihitung dalam satuan rupiah/tahun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Dihitung dalam satuan rupiah/tahun.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 23 ayat (2) menyatakan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Dihitung salam satuan rupiah/tahun.
4. Pertumbuhan Ekonomi (Sadono Sukirno) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Sehingga untuk mengetahuinya harus diadakan perbandingan pendapatan nasional dari tahun ke tahun, yang dikenal dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Uji Regresi Berganda

Analisis regresi adalah suatu analisis yang mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, atau definisi lain dari analisis regresi adalah studi ketergantungan dari variabel dependen pada satu atau lebih variabel lain, yaitu variabel independen (Gujarati, 1999).

Uji Parsial (Uji T)

Uji t adalah salah satu test statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa diantara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama, tidak terdapat perbedaan yang signifikan. (Sudjiono, 2010).

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel bebas atau variabel independen (X) terhadap variabel terikat atau variabel dependen (Y), atau dengan kata lain, nilai koefisien determinasi (R^2) ini berguna untuk memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel Y.

Uji Simultan (Uji F)

Uji f dikenal dengan Uji serentak, yaitu uji untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Atau untuk menguji apakah model regresi yang kita buat baik/signifikan atau tidak baik/non signifikan.

Uji Hipotesis

Menurut Widarjono (2016) untuk mengetahui kebenaran hipotesis. maka perlu dilakukan uji statistik berupa uji t, uji F dan Koefisien Determinasi R^2 (*Goodness Of Fit*).

Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka variabel dinyatakan berpengaruh, sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka variabel tidak berpengaruh.

Uji Asumsi Klasik

Beberapa pengujian asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, uji multikolinearitas, uji ini dilakukan untuk melihat adanya hubungan antara variabel independen di dalam regresi. Uji heteroskedastisitas, uji ini dilakukan untuk mengetahui adanya varian variabel gangguan yang tidak konstan. dan uji autokorelasi, uji ini dilakukan untuk melihat adanya hubungan variabel gangguan antara satu observasi dengan observasi yang lain.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya hubungan atau korelasi antar variabel independen. Konsekuensi dari adanya multikolinearitas adalah karena varian terus naik atau membesar jika ada multikolinearitas maka standard error β_1 dan β_2 juga naik atau membesar.

Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode (t) dengan periode sebelumnya (t-1). Dalam kaitannya dengan asumsi OLS, autokorelasi merupakan korelasi antara satu variabel gangguan dengan variabel gangguan yang lain.

Analisis Path

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Path. Path Analysis digunakan untuk menganalisis pola hubungan antar variable dengan tujuan mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat vaeriable bebas (eksogen) terhadap variable terikat (endogen).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Regresi Berganda Struktur 1 Uji T

Tabel 1 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.102	5.622		.552	.598		
	Ln_X1	.769	.304	.621	2.528	.039	.107	9.320
	Ln_X2	.181	.121	.369	1.504	.176	.107	9.320

a. Dependent Variable: Ln_Y (Belanja Daerah)

Berdasarkan data output SPSS dalam tabel ini maka dapat diberi intepretasi sebagai berikut :

- Persamaan regresi dari penelitian ini adalah $Y = 3.102 + 0.769X1 + 0.181X2$
- Nilai konstanta sebesar 3.102 mengandung arti bahwa jika nilai jumlah Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 0, maka Belanja Daerah akan sebesar 3.102 (tetap)
- Nilai keofisien regresi X1 sebesar 0.769, mengandung arti bahwa jika jumlah Penerimaan Pajak Daerah bertambah sebesar 1 satuan, maka Belanja Daerah naik sebesar 0.769
- Nilai keofisien regresi X2 sebesar 0.181, mengandung arti bahwa jika jumlah Penerimaan Retribusi Daerah bertambah sebesar 1 satuan, maka Belanja Daerah naik sebesar 0.181 □ Nilai t hitung Pajak Daerah adalah 2,528 dan nilai t hitung Retribusi Daerah adalah 1.504.

- Hasil Uji T (Parsial) table diatas Menunjukkan bahwa nilai Thitung **2,528** > Ttabel **2,364**, dengan tingkat signifikan $0,039 < 0,05$ Artinya penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
- Hasil Uji T (Parsial) table diatas Menunjukkan bahwa nilai Thitung **1.504** > Ttabel **2,364**, dengan tingkat signifikan $0,176 > 0,05$ Artinya penerimaan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Hasil Analisis Regresi Berganda Struktur 2 Uji T

Tabel 2 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.649	.940		12.399	.000		
	LOG_X1	.263	.117	.504	2.244	.060	.107	9.320
	LOG_X2	.101	.046	.490	2.182	.065	.107	9.320

a. Dependent Variable: LOG_Z

Berdasarkan data output SPSS dalam table ini maka dapat diberi intepretasi sebagai berikut :

- Persamaan regresi dari penelitian ini adalah **Z = 11.649 + 0.504X1 + 0.490X2**
- Nilai konstanta sebesar 11.649 mengandung arti bahwa jika nilai jumlah Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebesar 0, maka Pertumbuhan Ekonomi akan sebesar 11.649 (tetap)
- Nilai keofisien regresi X1 sebesar 0.504, mengandung arti bahwa jika jumlah Penerimaan Pajak Daerah bertambah sebesar 1 satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 0.504
- Nilai keofisien regresi X2 sebesar 0.490, mengandung arti bahwa jika jumlah Penerimaan Retribusi Daerah bertambah sebesar 1 satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 0.490 □
- Nilai t hitung Pajak Daerah adalah 2.244 dan nilai t hitung Retribusi Daerah adalah 2.182.
- Hasil Uji T (Parsial) table diatas Menunjukkan bahwa nilai Thitung **2.244** < Ttabel **2,364**, dengan tingkat signifikan $0.060 > 0,05$ Artinya penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
- Hasil Uji T (Parsial) table diatas Menunjukkan bahwa nilai Thitung **1.337** < Ttabel **2,364**, dengan tingkat signifikan $0.065 > 0,05$ Artinya penerimaan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil Analisis Regresi Berganda Struktur 3 Uji T

Tabel 3 Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.977	.293		40.942	.000		
	LOG_Y	.411	.031	.978	13.186	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: LOG_Z

- Persamaan regresi dari penelitian ini adalah $Z = 27.578 + 13.186Y$
- Nilai konstanta sebesar 27.578 mengandung arti bahwa jika nilai jumlah Belanja Daerah adalah sebesar 0, maka Pertumbuhan Ekonomi akan sebesar 27.578 (tetap)
- Nilai koefisien regresi Y sebesar 13.186, mengandung arti bahwa jika jumlah Belanja Daerah bertambah sebesar 1 satuan, maka Pertumbuhan Ekonomi naik sebesar 13.186
- Hasil Uji T (Parsial) table diatas Menunjukkan bahwa nilai Thitung $13.186 > T_{tabel} 2,306$, dengan tingkat signifikan $0.000 < 0,05$ Maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.978 ^a	.956	.951	.01773	1.715

a. Predictors: (Constant), LOG_Y

b. Dependent Variable: LOG_Z

- Nilai koefisien korelasi adalah sebesar 0,978. Besaran nilai koefisien korelasi ini mengandung arti bahwa keeratan hubungan antara Belanja Daerah sebagai variable bebas dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel terikat adalah sangat erat dan bersifat positif.
- Nilai koefisien determinasi sebesar 0,956 atau 95,6 persen. Besaran nilai koefisien determinasi sebesar 95,6 persen mengandung arti bahwa kontribusi atau sumbangan variable Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi sebesar 95,6 persen. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 4,4 persen disumbang oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Uji F

Tabel 5 ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.055	1	.055	173.869	.000 ^b
	Residual	.003	8	.000		
	Total	.057	9			

a. Dependent Variable: LOG_Z

b. Predictors: (Constant), LOG_Y

- Nilai signifikansi untuk pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan $F_{hitung} 173.869 > F_{tabel} 4.96$. Hal tersebut membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Uji Asumsi Klasik

Multikolinearitas

Tabel 6 Coefficients^a

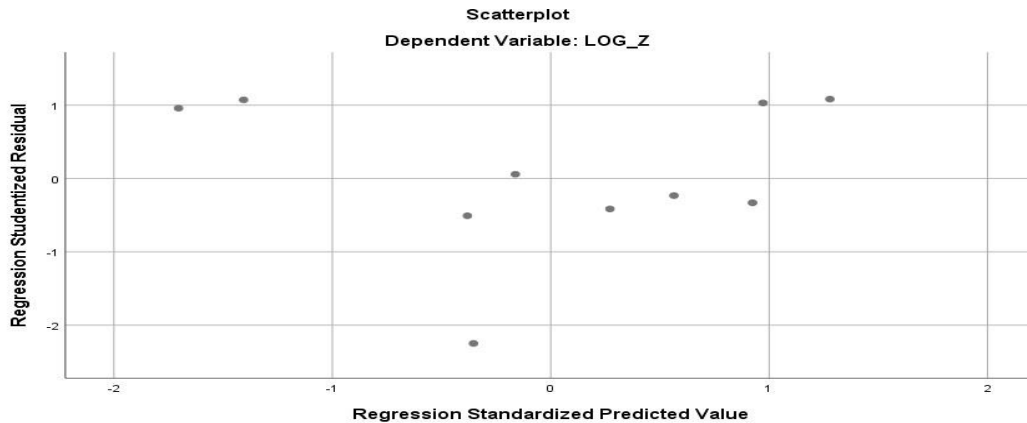
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.977	.293		40.942	.000		
	LOG_Y	.411	.031	.978	13.186	.000	1.000	1.000

a. Dependent Variable: LOG_Z

□ Hasil dari perhitungan terlihat pada diatas, menghasilkan nilai VIF untuk variabel Y kurang dari 10 (**1.000 < 10**) dan nilai *Tolerance* untuk seluruh variabel Y adalah sebesar **1.000**, lebih dari **0,1**. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model penelitian ini.

Heteroskedastisitas

Hasil uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 1 berikut:



□ Gambar 1 menyatakan bahwa grafik Scatterplot yang ditampilkan untuk uji heterokesdastisitas menampilkan titik-titik yang menyebar secara acak dan tidak ada pola yang jelas terbentuk serta dalam penyebaran titik-titik tersebut menyebar dibawah dan diatas angka 0 pada sumbu Y. Hal tersebut mengidentifikasi tidak terjadinya heterokesdastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel pertumbuhan ekonomi.

Autokorelasi

Tabel 7 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.978 ^a	.956	.951	.01773	1.715

a. Predictors: (Constant), LOG_Y

b. Dependent Variable: LOG_Z

- Tabel 4.16 diatas menyatakan bahwa nilai durbin Watson yang didapatkan adalah sebesar **1.715**. Maka ditarik kesimpulan berdasarkan dasar pengambilan keputusan durbin Watson yaitu dimana nilai d_u (**1,319**) $< d$ (**1,715**) $< 4 - d_u$ (**2,358**). Artinya hipotesis nol diterima dan **tidak terdapat autokorelasi** di dalam model regresi ini.

Hasil Analisis Jalur

a. Pengaruh Langsung

- Pengaruh pajak daerah terhadap belanja daerah X1 ke Y = 0.769
- Pengaruh retribusi daerah terhadap belanja daerah X2 ke Y = 0.181
- Pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi X1 ke Z = 0.504
- Pengaruh retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi X2 ke Z = 0.490
- Pengaruh belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Y ke Z = 13.186

b. Pengaruh Tidak Langsung

- Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah sebagai variable intervening $X1Y \times YZ = 0.769 \times 13.186 = 10,140$.
- Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah sebagai variable intervening $X2Y \times YZ = 0.181 \times 13.186 = 2,386$.

Pembahasan

1. Hasil Uji T (Parsial) Menunjukkan bahwa nilai Thitung **2,528** $>$ Ttabel **2,364**, dengan tingkat signifikan $0,039 < 0,05$ Artinya penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
2. Hasil Uji T (Parsial) Menunjukkan bahwa nilai Thitung **1,504** $>$ Ttabel **2,364**, dengan tingkat signifikan $0,176 > 0,05$ Artinya Penerimaan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.
3. Nilai signifikansi untuk pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan Fhitung **73,781** $>$ Ftabel **4,10** artinya penerimaan pajak dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
4. Hasil Uji T (Parsial) Menunjukkan bahwa nilai Thitung **2,244** $<$ Ttabel **2,364**, dengan tingkat signifikan $0,060 > 0,05$ Artinya penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
5. Hasil Uji T (Parsial) Menunjukkan bahwa nilai Thitung **1,337** $<$ Ttabel **2,346**, dengan tingkat signifikan $0,065 > 0,05$. Artinya penerimaan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
6. Hasil Uji T (Parsial) Menunjukkan bahwa nilai Thitung **13,186** $>$ Ttabel **2,306**, dengan tingkat signifikan $0,000 < 0,05$. Artinya belanja daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
7. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui Belanja Daerah Berdasarkan hasil yang didapat dalam analisis jalur (path) :
 - Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah sebagai variable intervening $X1Y \times YZ = 0.769 \times 13.186 = 10,140$. Diketahui bahwa Nilai Pengaruh langsung sebesar $0.769 <$ Nilai pengaruh tidak langsung $10,140$, hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung Penerimaan Pajak Daerah Melalui Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

- Pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah sebagai variable intervening $X2Y \times YZ = 0.181 \times 13.186 = 2,386$. Diketahui bahwa Nilai Pengaruh langsung sebesar $0.181 < \text{Nilai pengaruh tidak langsung } 2,386$, hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung Penerimaan Retribusi Daerah Melalui Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara Parsial Penerimaan Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Secara parsial Penerimaan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara
3. Secara Simultan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.
4. Secara Parsial Penerimaan Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara.
5. Secara Parsial Penerimaan Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara
6. Secara Parsial Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara
7. Secara simultan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara melalui Belanja Daerah.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai masukan:

1. Agar target Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Belanja Daerah dapat terealisasi dengan maksimal, instansi-instansi terkait perlu membuat strategi yang tepat, supaya potensi dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Daeah itu sendiri dapat tergali dengan maksimal.
2. Diperlukan kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di mana perlu diadakannya penyuluhan tentang manfaat pentingnya masyarakat wajib membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi adalah dengan cara meningkatkan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan mengalokasikannya secara baik dan tepat sasaran guna pemerataan pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat miskin yang produktif dan memiliki penghasilan yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin, (2015). *Ekonomi Pembangunan Edisi Ke-5*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN
- Asfia Murni, SE., M.Pd, (2013). *Ekonomika Makro Edisi Revisi*. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama
- Agus Tri Basuki, (2016). *Pengantar Ekonometrika (Dilengkapi Penggunaan Eviews)*. Yogyakarta: Penerbit Danisa Media
- Agus Widarjono, Ph.D, (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN
- Abdul Halim, (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Ketiga*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Badrudin, R, (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit UPP STIM YKPN
- Badan Pusat Statistik, (2010-2019) *Sulawesi Utara Dalam Angka*. Sulawesi Utara
- Darwin, (2010). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Republik Indonesia, (2019), Maret 12. *Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Gujarati, D. dan Dawn C.P, (2015). *Dasar-Dasar Ekonometrika. Edisi Kelima, Buku 1*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Ju Kumala, Dewi, (2018). *Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Tenaga Kerja Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 7(06): 1695-1722
- Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. *Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara*. Sulawesi Utara.
- Mardiasmo, (2006). *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Putri, P.I, (2013). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak". *Journal of Economics and Policy*, 6 (2): 103-213.
- Rencana Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahun Anggaran 2021
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, 2016-2021

Mononimbar, Reggie, (2014). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Daerah Sebagai Variabel Intervening Di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014)*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi 17(02): 48-59

Waluyo dan Wirawan B.I. (2000). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Wawan Hermawan dan Adhitya Wardhana (2016), *Pengaruh Penerimaan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.

<https://sulut.bps.go.id/indicator/13/625/1/realisasi-belanja-pemerintah-provinsi-sulawesi-utara-menurutjenis-pengeluaran-2000-2018.html>